
**PENYUSUNAN SATUAN STANDAR HARGA DALAM TAHAPAN PERENCANAAN ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

***Preparation of Standard Unit Prices in the Budget Planning Stage of the Central Kalimantan
Provincial Government***

Adi Tya Indrawan^{1*}

Andriansyah²

Novianita Rulandari³

^{*12} Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jakarta, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
Indonesia

*email:

adi.tyaindrawan@student.umj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) dalam proses perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya Peraturan Gubernur sebagai pedoman khusus, yang menyebabkan ketidakonsistenan dan inefisiensi dalam input anggaran oleh perangkat daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi formal yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk menjamin perencanaan anggaran yang akurat, efisien, dan akuntabel.

Kata Kunci:

Satuan Standar,
Harga Perencanaan Anggaran,
Kalimantan Tengah

Keywords:

Standard Unit Price
Budget Planning
Central Kalimantan

Abstract

This study examines the preparation of the Standard Unit Price (SSH) in the budget planning process of the Central Kalimantan Provincial Government. Findings reveal the absence of a specific Governor Regulation as a guideline, leading to inconsistencies and inefficiencies in budget input by local agencies. The study emphasizes the need for a formal regulation tailored to local conditions to ensure accurate, efficient, and accountable budget planning.

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang terencana dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, perencanaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi kunci utama. Salah satu instrumen penting dalam proses perencanaan anggaran adalah penyusunan Satuan Standar Harga (SSH), yang berfungsi sebagai acuan dalam

menetapkan kebutuhan anggaran berbasis harga satuan yang wajar dan sesuai kondisi daerah. Keberadaan SSH yang akurat tidak hanya mendorong efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan SSH yang tidak dilakukan secara tepat berisiko menimbulkan berbagai persoalan, seperti inefisiensi belanja, ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan riil, dan potensi pemborosan sumber daya publik. Tantangan-tantangan seperti kurangnya data

harga yang mutakhir, minimnya koordinasi antarperangkat daerah, dan lemahnya sistem pengendalian internal kerap menjadi penghambat dalam proses ini. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi geografis yang luas dan keragaman karakteristik wilayah semakin memperumit proses penyusunan SSH yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penyusunan SSH dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, adaptif, dan berbasis data aktual agar mendukung pencapaian perencanaan anggaran yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pentingnya penyusunan SSH dalam perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas proses penyusunannya. Fokus diberikan pada upaya membangun pendekatan penyusunan SSH yang tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan dinamika pasar lokal dan kondisi sosial ekonomi wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan perencanaan anggaran daerah yang lebih responsif dan efisien.

Dalam kajian administrasi publik, topik mengenai SSH telah dibahas oleh berbagai peneliti sebelumnya, terutama dalam konteks penyusunan anggaran berbasis kinerja dan efisiensi fiskal daerah. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek teknis dan normatif penyusunan SSH, tanpa mengelaborasi secara rinci proses, kendala, dan solusi dalam konteks spesifik daerah. Penelitian ini hadir untuk melengkapi celah tersebut, dengan menyoroti bagaimana karakteristik lokal Kalimantan Tengah dapat memengaruhi penyusunan SSH dan bagaimana kebijakan teknis ini dapat dioptimalkan agar sesuai

dengan kebutuhan perencanaan anggaran yang berbasis evidence.

Sebagai mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta, peneliti berusaha memberikan kontribusi ilmiah melalui pendekatan analitis yang menggabungkan dimensi kebijakan publik, tata kelola keuangan daerah, serta penguatan institusional dalam penyusunan SSH. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap konteks daerah yang selama ini kurang tereksplorasi dalam literatur, serta pendekatan integratif yang mendorong efektivitas proses penyusunan SSH melalui penguatan data, koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik dalam administrasi publik, tetapi juga memberikan masukan konkret bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini juga menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Sumber utama penelitian ini adalah Peraturan yang mendasari Standar Satuan Harga, Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Standar Satuan Harga Provinsi Kalimantan Tengah serta karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan penyusunan standar harga seperti artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait.

I Made Winarta (2006) menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi proses analisis, penggambaran serta ringkasan atas berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang berasal dari hasil wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah yang sedang diteliti. Sedangkan, Sugiyono (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai

sebuah metode penelitian yang menggunakan filsafat postpositivisme sebagai landasannya, dimana hal tersebut umumnya dipergunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objektif dengan peneliti yang bertugas menjadi instrument kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyusunan standar harga satuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilandasi oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Satuan Standar Harga dapat didefinisikan sebagai harga satuan atas suatu komponen belanja yang berlaku pada pemerintah daerah untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. SSH digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan anggaran yang lebih realistis, serta untuk menghindari ketidaksesuaian atau ketimpangan harga antarinstansi dan wilayah dalam satu pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberadaan SSH yang akurat dan mutakhir sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian mengenai penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur pedoman penyusunan SSH. Ketiadaan regulasi tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam proses perencanaan anggaran karena menyebabkan belum adanya dasar hukum dan prosedur baku yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menetapkan harga satuan barang dan

jasa. Hal ini berdampak pada potensi ketidakterpaduan antara satu OPD dengan OPD lainnya, serta menyulitkan proses validasi dan pengawasan dalam tahapan penganggaran. Temuan tersebut dapat dilihat pada peraturan yang menjadi dasar dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 33 Tahun 2024 tentang standar harga satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, yang ditampilkan sebagai berikut :



Gambar 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 33 Tahun 2024

Pentingnya keberadaan pedoman resmi dalam bentuk Peraturan Gubernur tidak dapat diabaikan, mengingat kondisi geografis dan kebutuhan daerah Kalimantan Tengah yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Provinsi ini memiliki karakteristik tersendiri, seperti jarak antarwilayah yang jauh, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan distribusi logistik yang memengaruhi fluktuasi harga barang dan jasa secara signifikan. Oleh karena itu, tanpa adanya pedoman khusus, standar harga yang digunakan berisiko tidak mencerminkan realitas di lapangan, sehingga menyulitkan tercapainya efisiensi dan akurasi dalam perencanaan anggaran.

Ketiadaan peraturan tersebut juga menunjukkan bahwa proses penyusunan SSH di tingkat provinsi saat ini lebih banyak mengandalkan referensi umum, seperti e-katalog nasional atau dokumen dari kementerian/lembaga pusat, yang belum tentu sepenuhnya relevan dengan kondisi lokal Kalimantan Tengah. Hal ini menyebabkan potensi perbedaan harga antara yang tercantum dalam SSH dengan harga riil di pasar lokal, yang pada akhirnya bisa berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan kredibilitas sistem penganggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini menekankan perlunya intervensi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman resmi penyusunan SSH yang bersifat lokalistik, partisipatif, dan berbasis data. Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, agar dapat menghasilkan standar harga yang realistis, adil, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan adanya pedoman tersebut, proses penyusunan anggaran diharapkan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan tepat sasaran, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Harga Satuan pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” oleh Riska Amanda dan Deliza Henny menemukan bahwa penerapan standar harga satuan dalam penyusunan APBD masih menghadapi berbagai permasalahan teknis. Salah satu temuan penting adalah masih seringnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) menginput anggaran kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan yang bersifat dummy, yakni tidak sesuai dengan realitas harga dan tidak mencerminkan keluaran (output) dari kegiatan yang direncanakan. Hal ini dinilai berisiko karena dapat memicu ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan capaian kinerja, serta menimbulkan polemik di masyarakat terkait efektivitas belanja pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek (Studi Kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo)” oleh Raflina Yuniarti Dai, Zulkifli Boki, Muliyani Mahmud menemukan bahwa Hasil dari perhitungan standar satuan harga pada belanja bimtek meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Suviner (Cendera Mata) sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Pasal 8 Tahun 2022 tentang standar satuan harga yang berisi mengenai standar satuan harga tertinggi barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Dalam penelitian ini, yang mengambil studi kasus di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa belum adanya Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur pedoman penyusunan SSH menjadi akar persoalan dalam proses penganggaran. Ketidadaan regulasi ini menyebabkan tidak adanya panduan yang sistematis dan baku bagi OPD dalam menentukan harga satuan, sehingga rentan menimbulkan praktik serupa dengan yang ditemukan di DKI Jakarta, yakni penggunaan harga satuan yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan substansi kegiatan. Dengan kata lain, meskipun konteks wilayah berbeda, terdapat kesamaan permasalahan dalam hal kurangnya ketepatan dan kesesuaian penggunaan SSH oleh perangkat daerah.

Kesamaan masalah ini menunjukkan bahwa baik di daerah dengan infrastruktur dan sistem yang relatif maju seperti DKI Jakarta, maupun di daerah dengan tantangan geografis seperti Kalimantan Tengah, kualitas penerapan SSH sangat dipengaruhi oleh tersedianya regulasi teknis dan pengawasan yang kuat. Dalam konteks Kalimantan Tengah, masalah diperparah dengan belum adanya regulasi formal berupa Peraturan Gubernur yang secara khusus menjabarkan mekanisme, tanggung jawab, dan prosedur penyusunan SSH yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Akibatnya, OPD cenderung bekerja berdasarkan asumsi atau mengikuti pola lama yang tidak selalu relevan, sehingga berpotensi menghasilkan output anggaran yang tidak optimal.

Dengan membandingkan kedua penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SSH sangat ditentukan oleh adanya pedoman hukum yang jelas, sistem informasi yang mendukung, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa regulasi di tingkat daerah, seperti

Peraturan Gubernur, merupakan instrumen penting yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, selain menyadari adanya kesamaan kendala seperti input standar harga yang tidak sesuai, penelitian ini menekankan perlunya tindakan strategis berupa penyusunan regulasi daerah yang kontekstual agar praktik perencanaan anggaran menjadi lebih akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi kendala signifikan akibat belum adanya Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur pedoman penyusunannya. Ketidadaan pedoman ini menyebabkan tidak adanya acuan baku bagi perangkat daerah dalam menetapkan harga satuan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran yang diusulkan dengan kondisi riil di lapangan. Permasalahan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di DKI Jakarta, yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam menginput harga satuan berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan berupa penyusunan regulasi yang kontekstual dan partisipatif agar SSH di Kalimantan Tengah dapat disusun secara tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai institusi tempat penulis menempuh pendidikan, serta kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan

rekan-rekan yang telah memberikan arahan, semangat, serta kontribusi selama proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 2024, 361–371.
- Hariyanti, A., & Rahayu, T. P. (2024). Implementation of good governance in improving public service performance at BNNP Central Borneo. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 1–6.
- Made Winartha, K. I. (2006). *Metodologi penelitian sosial ekonomi*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Muannif Ridwan, Suhur, A. M., Bahrul Ulum, & Fauzi Muhammad. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang standar harga satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang standar harga satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Pratama, M. A., & Mustikaningsih, W. (2022). Politik kesejahteraan; analisa kesejahteraan masyarakat dalam kondisi triple disruption (Kajian para pedagang kuliner lokal desa wisata; antara Pelabuhan Rambang dan Dermaga Kereng Bengkirai). *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 430–441.
- Raflina Yuniarti Dai, Z., Boku, Z., & Mahmud, M. (2023). Analisis standar satuan harga (SSH) pada penyusunan anggaran belanja bimtek (Studi kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo). SEIKO.
- Riska Amanda, & Henny, D. (2022). Analisis penerapan standar harga satuan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Satia, M. R., Irwani, I., Riyanti, N., Selawaty, D., & Rahman, S. (2024). Study of urban area development: Consistency of urban policy and planning based on local wisdom of the Dayak tribe. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(1).
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, R. A., Ridho, F., & Yuwono, D. T. (2024). Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap trend digital forensik pada saat pemilu Indonesia: The bibliometric analysis using VOSviewer on digital forensics trends during the Indonesian election. *Pencerah Publik*, 11(1), 33–41.
- Yusuf, M., Bernardianto, R. B., Satia, H. M. R., Nurhasanah, N., Irwani, I., Setyoko, P. I., & Saputra, A. S. (2023). Investigating the role transformational leadership, innovative work behavior, and team member exchange on public service organization performance. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6), e868–e868.
- Yusuf, M., Satia, M. R., Bernardianto, R. B., Nurhasanah, N., Irwani, I., Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2023). Exploring the role of digital leadership and digital transformation on the performance of the public sector organizations. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1983–1990.
- Yuwono, D. T., & Hariyanti, A. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, 6(2), 367–374.